



Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia: Tinjauan Literatur dengan Model Edward III

Implementation of Free Nutritious Meal Policy in Indonesia: A Literature Review Using Edward III Model

Fauziah Hasanah^{1*}, Riza Adelia Suryani²

Universitas Sriwijaya

Email : fiirdafh@gmail.com^{1*}, rizaadeliasuryani@fisip.unsri.ac.id²

Article Info

Article history :

Received : 14-06-2026

Revised : 16-06-2026

Accepted : 18-06-2026

Published : 20-06-2026

Abstract

The Free Nutritious Meal (MBG) program is a strategic policy of the Indonesian government to address nutritional issues and strengthen human resources. This study aims to analyze the implementation of MBG based on Edward III's model, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The method used is a qualitative literature review of 10 relevant scientific articles. The results indicate that policy communication is unsystematic, leading to disinformation and weak coordination. Although the budget is large, personnel competence and infrastructure are uneven, causing regional disparities. Implementers have a positive attitude but are burdened by additional tasks without adequate training. The bureaucratic structure lacks standard operating procedures, has weak inter-sectoral coordination, and experiences overlapping authorities. In conclusion, the success of MBG requires comprehensive improvements in communication systems, human resource capacity, bureaucratic simplification, and strengthening of vertical and horizontal coordination.

Keywords : *Free Nutritious Meal, Policy Implementation, Edward III Model*

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah gizi dan memperkuat sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi MBG berdasarkan model Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan menelaah 10 artikel ilmiah relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan tidak sistematis, menyebabkan disinformasi dan lemahnya koordinasi. Sumber daya anggaran besar namun kompetensi pelaksana dan infrastruktur tidak merata, menimbulkan kesenjangan antar daerah. Disposisi pelaksana positif tetapi terbebani oleh tugas tambahan tanpa pelatihan memadai. Struktur birokrasi belum memiliki SOP baku, koordinasi lintas sektor lemah, dan terjadi tumpang tindih kewenangan. Kesimpulannya, keberhasilan MBG memerlukan perbaikan menyeluruh pada sistem komunikasi, peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan birokrasi, serta penguatan koordinasi vertikal dan horizontal.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Makan Bergizi Gratis, Model Edward III*

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh masih adanya berbagai persoalan gizi, seperti stunting, gizi kurang, dan ketimpangan akses terhadap pangan bergizi yang dapat memengaruhi kesehatan, perkembangan kognitif, serta kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang



(Rambe dkk., 2025; Wibisono & Santosa, 2026). Kecukupan asupan gizi tidak sekadar berdampak pada kesehatan perorangan, melainkan turut mendorong peningkatan kemampuan belajar, produktivitas, serta mutu pendidikan para siswa (Yuliani dkk., 2026).

Pelaksanaan MBG secara nasional sejak Januari 2025 menempatkan program ini sebagai salah satu instrumen kebijakan yang memiliki cakupan luas dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sasaran program yang mencakup peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan menuntut tersedianya sistem pelaksanaan yang mampu menjangkau wilayah dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam (Yuliani dkk., 2026). Dalam praktiknya, penyelenggaraan MBG tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada kemampuan berbagai institusi dalam menjalankan fungsi koordinasi, distribusi, pengawasan, dan pelayanan pemenuhan gizi secara berkelanjutan (Basuki dkk., 2026).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBG masih menghadapi berbagai tantangan. Kajian yang dilakukan Basuki dkk. (2026) menunjukkan adanya persoalan terkait koordinasi kelembagaan, ketimpangan distribusi, risiko operasional, serta tata kelola program yang belum optimal. Penelitian Wibisono & Santosa (2026) juga menemukan bahwa disparitas infrastruktur, kapasitas kelembagaan daerah, dan permasalahan keamanan pangan menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan program. Dari perspektif manajemen sumber daya manusia, Rambe dkk. (2025) mengidentifikasi adanya keterbatasan kompetensi pelaksana, belum jelasnya pembagian peran, serta lemahnya koordinasi lintas sektor dalam implementasi MBG.

Persoalan implementasi juga terlihat pada aspek komunikasi kebijakan. Pujiyanto & Solihat (2026) menemukan bahwa penyampaian informasi mengenai MBG kepada kelompok sasaran belum sepenuhnya berjalan efektif. Informasi program masih banyak diperoleh melalui media sosial dibandingkan saluran resmi yang disediakan pelaksana program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi program yang dirancang pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dalam mengomunikasikan kebijakan kepada masyarakat secara tepat dan konsisten.

Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak aktor, sumber daya, serta mekanisme koordinasi yang saling berkaitan. Kompleksitas tersebut sejalan dengan pandangan Edward III yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Kendi, 2024). Keempat variabel tersebut menjadi elemen penting dalam menjelaskan mengapa suatu kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan atau justru menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.

Meskipun kajian mengenai Program Makan Bergizi Gratis terus berkembang, penelitian terdahulu umumnya membahas aspek implementasi secara parsial, seperti komunikasi, sumber daya manusia, ketahanan gizi, maupun evaluasi pelaksanaan program. Temuan-temuan tersebut masih tersebar dalam berbagai penelitian sehingga belum memberikan gambaran yang terintegrasi mengenai implementasi MBG berdasarkan perspektif model implementasi kebijakan Edward III. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.



TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan otoritatif yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya bersifat mengikat, sementara Anderson memaknainya sebagai rangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan diikuti oleh aktor-aktor pemerintah dalam mengatasi suatu masalah publik (Herdiana dkk., 2025). Kedua definisi tersebut menegaskan bahwa kebijakan publik bukan sekadar pernyataan keinginan pejabat, melainkan keputusan yang bersifat mengikat dan diarahkan pada tindakan nyata untuk kepentingan bersama. Tindakan nyata inilah yang kemudian diuji pada tahap implementasi.

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan karena pada fase ini kebijakan yang telah dirumuskan diwujudkan dalam tindakan nyata. Menurut Kendi (2024), implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis, tetapi juga melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan kondisi lingkungan yang saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh efektivitas proses pelaksanaannya.

Salah satu model yang banyak digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan adalah model George C. Edward III. Kendi (2024) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu proses penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana. Komunikasi yang efektif ditandai oleh ketepatan penyampaian, kejelasan pesan, dan konsistensi informasi.
2. Sumber daya, yaitu segala dukungan yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan, seperti anggaran, sumber daya manusia, kewenangan, serta sarana dan prasarana.
3. Disposisi atau sikap pelaksana, yaitu komitmen dan kemauan implementor dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sikap yang positif akan mendukung keberhasilan implementasi.
4. Struktur birokrasi, yaitu mekanisme organisasi yang mengatur pelaksanaan kebijakan, termasuk keberadaan SOP dan koordinasi antar unit pelaksana. Struktur yang jelas akan memudahkan implementasi kebijakan secara konsisten (Kendi, 2024).

Keempat variabel tersebut saling memengaruhi dan menjadi faktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mulai dilaksanakan secara serentak sejak 6 Januari 2025. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya permasalahan malnutrisi dan stunting pada anak-anak di Indonesia, khususnya pada kelompok masyarakat menengah ke bawah (Herdiana dkk., 2025). Program ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang menetapkan BGN sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemenuhan gizi nasional (Febryanti dkk., 2025). Kebijakan MBG diharapkan tidak hanya mampu menurunkan



angka malnutrisi dan stunting, tetapi juga memastikan kecukupan gizi anak-anak sesuai standar Angka Kecukupan Gizi (AKG), sekaligus menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh anak untuk memperoleh makanan bergizi tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarganya (Herdiana dkk., 2025).

Adapun sasaran program ini mencakup peserta didik pada jenjang PAUD hingga pendidikan menengah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dalam tataran pembiayaan, anggaran MBG pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp71 triliun dengan harga per porsi makanan maksimal Rp15.000, mencakup satu paket menu lengkap yang memenuhi 20–25% AKG harian untuk siswa kelas 1–3 SD dan 30–35% AKG harian untuk siswa kelas 4–6 SD (Febryanti dkk., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari 10 artikel ilmiah mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah dan mengkaji artikel yang relevan dengan fokus penelitian. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan empat variabel implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Temuan Literatur

No	Variabel Edward III yang Diteliti	Temuan Literatur	Referensi
1	Komunikasi	Komunikasi dalam implementasi program MBG, khususnya terkait sosialisasi, masih minim di tingkat sekolah akibat minimnya sosialisasi dari pemerintah pusat dan daerah. Munculnya beragam hoaks dan disinformasi membuat sekolah kesulitan menanggulangnya. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga masih lemah sehingga berdampak pada komunikasi internal sekolah. Program MBG juga akan mengalami hambatan besar di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) akibat keterbatasan akses digital dan infrastruktur.	(Ariyani dkk., 2026; Basuki dkk., 2026; Hanasi dkk., 2026; Pora dkk., 2025; Pujiyanto & Solihat, 2026; Suryanto dkk., 2026; Wibisono & Santosa, 2026; Yuliani dkk., 2026)
2	Sumber Daya	Sumber daya anggaran program MBG sangat besar sehingga berpotensi membebani keuangan negara dan menggeser prioritas di bidang pendidikan. Sumber daya pelaksana, terutama kepala sekolah dan guru, mendapat beban kerja tambahan tanpa pelatihan yang	(Ariyani dkk., 2026; Basuki dkk., 2026; Pora dkk., 2025; Rambe dkk., 2025; Silaban dkk., 2026; Suryanto



	memadai. Kompetensi pelaksana di lapangan (juru masak, pengelola SPPG, guru) masih rendah karena program baru dan minimnya pelatihan teknis. Infrastruktur pendukung (dapur, gudang, kendaraan distribusi) belum merata, terutama di wilayah timur Indonesia, yang menyebabkan keterlambatan dan penurunan kualitas makanan.	dkk., 2026; Wibisono & Santosa, 2026; Yuliani dkk., 2026)
3	Disposisi atau Sikap Pelaksana Pelaksana di tingkat sekolah, yakni kepala sekolah dan guru, pada umumnya menyambut baik program MBG karena menyadari manfaatnya bagi gizi dan motivasi belajar siswa. Namun demikian, mereka merasa terbebani oleh tanggung jawab tambahan yang tidak sesuai dengan tugas pokok sebagai pendidik. Ketidaksiapan kompetensi dan lemahnya dukungan organisasi menyebabkan inkonsistensi pelaksanaan antar sekolah. Di beberapa daerah, terjadi pula resistensi pasif dari siswa akibat kekhawatiran akan keamanan pangan.	(Ariyani dkk., 2026; Hanasi dkk., 2026; Pora dkk., 2025; Pujiyanto & Solihat, 2026; Rambe dkk., 2025; Suryanto dkk., 2026)
4	Struktur Birokrasi Struktur birokrasi pelaksanaan MBG masih menghadapi berbagai permasalahan, di antaranya tumpang tindih kewenangan antar lembaga (BGN, Kemendikbud, Kemenkes, pemerintah daerah), regulasi teknis yang mengikat belum tersedia, serta SOP yang belum seragam sehingga menimbulkan variasi implementasi antar daerah. Selain itu, keterlibatan militer dan swasta tanpa mekanisme pengawasan yang jelas berisiko menimbulkan konflik kepentingan. Diperlukan penyederhanaan birokrasi dan penguatan tata kelola kolaboratif dengan aktor lokal (UMKM, petani, komite sekolah).	(Ariyani dkk., 2026; Basuki dkk., 2026; Hanasi dkk., 2026; Pora dkk., 2025; Rambe dkk., 2025; Silaban dkk., 2026; Suryanto dkk., 2026; Wibisono & Santosa, 2026; Yuliani dkk., 2026)

Sumber: Data diolah penulis

Komunikasi

Efektivitas komunikasi merupakan prasyarat mendasar dalam implementasi kebijakan, sebagaimana ditegaskan Edward III. Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dimensi ini menjadi titik lemah yang paling awal teridentifikasi. Ariyani dkk. (2026) melaporkan bahwa sosialisasi program cenderung berlangsung informal dan tidak terdokumentasi, sehingga pemahaman antar satuan pendidikan tidak seragam. Minimnya sosialisasi resmi membuat sekolah kesulitan menyampaikan informasi yang akurat kepada siswa dan orang tua (Suryanto dkk., 2026).



Kekosongan komunikasi resmi tersebut kemudian diisi oleh informasi yang tidak terverifikasi. Pora dkk. (2025) mencatat bahwa hoaks seputar kualitas makanan dan mekanisme distribusi menyebar luas melalui media sosial, mengikis kepercayaan publik terhadap program. Pujiyanto & Solihat (2026) menemukan bahwa sekolah tidak mampu meluruskan persepsi keliru karena tidak dibekali pedoman komunikasi yang jelas dari pemerintah.

Pada dimensi koordinasi antar lembaga, persoalannya tidak kalah serius. Yuliani dkk. (2026) menegaskan bahwa ketiadaan mekanisme komunikasi formal antara BGN, kementerian teknis, dan pemerintah daerah menyebabkan sekolah kerap menerima instruksi yang saling bertentangan. Basuki dkk. (2026) menambahkan bahwa wilayah 3T menanggung beban akibat keterbatasan infrastruktur digital yang membuat sosialisasi sulit menjangkau masyarakat. Ketiga aspek komunikasi Edward III, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi, dengan demikian belum terpenuhi, dan perbaikannya menuntut desain komunikasi kebijakan yang sistematis, bukan sekadar penambahan frekuensi sosialisasi.

Sumber Daya

Sumber daya mencakup keseluruhan kapasitas yang dibutuhkan agar kebijakan dapat dioperasionalkan secara nyata, mulai dari anggaran, kompetensi pelaksana, hingga kelengkapan sarana-prasarana. Program MBG menghadirkan paradoks menarik dalam dimensi ini: alokasi dana yang sangat besar ternyata tidak serta-merta menjamin kelancaran implementasi. Yuliani dkk. (2026) mencatat bahwa anggaran MBG pada APBN 2025 mencapai Rp71 triliun, sementara Basuki dkk. (2026) mengidentifikasi bahwa sumber pendanaan tersebut sebagian berasal dari efisiensi sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga berpotensi menggeser prioritas pembangunan lainnya. Pora dkk. (2025) menambahkan bahwa risiko kebocoran anggaran dan tekanan inflasi akibat lonjakan permintaan pangan belum sepenuhnya dimitigasi dalam perencanaan program.

Persoalan yang lebih mendasar justru ditemukan pada dimensi sumber daya manusia. Ariyani dkk. (2026) menegaskan bahwa keterbatasan kapasitas SDM pelaksana merupakan faktor paling dominan yang menentukan keberhasilan MBG di tingkat satuan pendidikan. Kepala sekolah dan guru mendapat beban kerja tambahan berupa pendataan, pengawasan distribusi, hingga pelaporan harian tanpa dibekali pelatihan yang memadai. Suryanto dkk. (2026) menambahkan bahwa kompetensi juru masak dan pengelola SPPG pun masih rendah karena mekanisme pelatihan teknis belum terstandarisasi sejak awal program berjalan.

Ketimpangan infrastruktur menjadi lapis persoalan berikutnya yang tidak dapat diabaikan. Wibisono & Santosa (2026) mencatat bahwa disparitas sarana pendukung antarwilayah seperti dapur, kendaraan berpendingin, gudang penyimpanan, secara langsung menghasilkan variasi kualitas layanan yang signifikan. Di wilayah timur Indonesia, Basuki dkk. (2026) melaporkan bahwa ketiadaan *cold chain* yang memadai menyebabkan makanan kerap tiba tidak dalam kondisi segar. Rambe dkk. (2025) dan Silaban dkk. (2026) mengonfirmasi bahwa kesiapan kelembagaan daerah yang tidak merata memperparah kondisi ini, sehingga efektivitas implementasi MBG berbeda tajam antara daerah yang sudah siap dan yang belum.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana dalam model Edward III merujuk pada kemauan, komitmen, dan penerimaan para pelaksana terhadap kebijakan yang ditugaskan kepada mereka. Dalam



implementasi MBG, disposisi pelaksana di tingkat sekolah secara umum berada pada posisi yang positif. Ariyani dkk. (2026) menemukan bahwa kepala sekolah dan guru menyambut program ini dengan terbuka karena menyadari dampak langsungnya terhadap kondisi gizi dan konsentrasi belajar siswa. Pora dkk. (2025) menambahkan bahwa dukungan tersebut berakar pada kesesuaian antara tujuan program dengan nilai-nilai yang dipegang para pendidik.

Sikap positif tersebut tidak serta-merta berbanding lurus dengan kesiapan teknis pelaksana. Suryanto dkk. (2026) mengidentifikasi bahwa guru dan kepala sekolah menanggung tanggung jawab tambahan yang jauh melampaui kompetensi inti mereka sebagai pendidik, mulai dari manajemen distribusi makanan hingga tata kelola pelaporan harian. Rambe dkk. (2025) mencatat bahwa ketidakjelasan pembagian tugas antara aktor dan minimnya pelatihan secara bertahap mengikis kepercayaan diri pelaksana dalam menjalankan program. Situasi ini menggambarkan kondisi yang ironis, yakni disposisi yang baik justru berpotensi terkuras oleh beban sistem yang tidak dirancang untuk menopang pelaksana secara adil.

Tekanan dalam pelaksanaan program pada beberapa kondisi dapat berkembang menjadi bentuk resistensi, meskipun tidak selalu ditunjukkan secara terbuka. Pujiyanto & Solihat (2026) menemukan adanya perbedaan tingkat pelaksanaan antar sekolah yang banyak dipengaruhi oleh variasi kapasitas serta dukungan yang diterima oleh masing-masing satuan pendidikan. Sementara itu, Pora dkk. (2025) melaporkan bahwa rendahnya minat sebagian siswa untuk mengonsumsi makanan yang disediakan di beberapa daerah mengindikasikan bahwa komitmen pelaksana saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan program tanpa didukung oleh standar teknis yang memadai. Selain itu, Hanasi dkk. (2026) menegaskan bahwa peran kepemimpinan kepala sekolah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konsistensi implementasi. Sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah yang proaktif dalam mengkoordinasikan dan memotivasi staf umumnya mampu menjalankan program dengan lebih stabil dan berkelanjutan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam kerangka Edward III mencakup dua elemen utama yang saling menopang, yakni ketersediaan prosedur operasional standar sebagai panduan tindakan pelaksana, dan fragmentasi organisasi yang menentukan bagaimana tanggung jawab dibagi antar unit yang terlibat. Basuki dkk. (2026) mengungkapkan bahwa hingga program ini berjalan, belum tersedia regulasi teknis yang secara rinci mengatur mekanisme distribusi, standar gizi, maupun pembagian tanggung jawab antarinstansi. Minimnya landasan hukum yang kuat membuat banyak daerah beraktivitas tanpa acuan standar, sehingga pelaksanaan di lapangan sangat beragam dan sulit diawasi. Silaban dkk. (2026) mengonfirmasi bahwa dominasi pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan turut mempersempit ruang gerak daerah untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi lokal yang beragam.

Fragmentasi kewenangan antar instansi masih menjadi tantangan penting dalam implementasi program. Yuliani dkk. (2026) menunjukkan bahwa koordinasi antara BGN, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih tugas pada beberapa aspek, sementara pada aspek lainnya justru terjadi ketidakjelasan pembagian tanggung jawab. Temuan Pora dkk. (2025) juga mengungkapkan bahwa koordinasi antarinstansi cenderung dilakukan secara reaktif dan hanya pada situasi tertentu, sehingga belum berkembang menjadi mekanisme yang terstruktur dan



berkelanjutan. Selain itu, Hanasi dkk. (2026) menekankan bahwa ketiadaan sistem pengawasan yang independen dan transparan dapat meningkatkan risiko terjadinya praktik yang merugikan penerima manfaat. Oleh karena itu, penguatan regulasi teknis serta pembentukan forum koordinasi lintas sektor yang berlangsung secara rutin menjadi langkah yang perlu segera diwujudkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan model Edward III, penelitian ini menemukan bahwa keempat variabel implementasi saling terkait dan secara kolektif menentukan keberhasilan kebijakan. Temuan utama menunjukkan bahwa kelemahan paling fundamental terletak pada komunikasi kebijakan yang tidak sistematis, menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara jelas dan konsisten, serta memicu disinformasi. Sumber daya yang tersedia, meskipun anggaran besar, belum didukung oleh kompetensi pelaksana dan infrastruktur yang merata, sehingga menghasilkan kesenjangan kualitas antar daerah. Disposisi pelaksana yang positif tidak cukup untuk mengatasi beban kerja berlebih dan ketidaksiapan teknis, sementara struktur birokrasi yang belum memiliki SOP baku dan koordinasi lintas sektor yang lemah memperparah fragmentasi implementasi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran atau niat baik pelaksana, tetapi pada perbaikan menyeluruh terhadap sistem komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyederhanaan struktur birokrasi, serta penguatan mekanisme koordinasi vertikal dan horizontal. Untuk penelitian lanjutan, disarankan melakukan studi empiris lapangan di berbagai wilayah dengan keragaman geografis dan sosial untuk menguji secara langsung interaksi antar variabel Edward III dalam konteks lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, N., Dema, H., & Irwan, I. (2026). Implementasi Kebijakan dan Tata Kelola Makanan Bergizi Gratis pada Tingkat Satuan Pendidikan: Studi Kasus di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Papatung*, 9(2), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/japp.v9i1.1579>
- Basuki, R. M., Muharrom, N. W., Kusuma, N. A., & Hadji, K. (2026). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Evaluasi Pelaksanaan dan Tantangan Operasional. *Nur Wahid Muharrom*, 4(1), 1413–1423. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3208>
- Febryanti, I., Indiaty, I., Pane, M. A., & Astuti, P. (2025). Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) (Studi Kasus di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang). *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 067–079. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v7i1.26628>
- Hanasi, R. A., Akuba, I., Wahab, I. M., Monoarfa, C., Ahmad, M. R. M., & Pantoiyo, A. P. (2026). Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Pendorong dan Pembangunan Ekonomi Lokal. *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(1), 95–112. <https://doi.org/10.55606/jumbiku.v6i1.6403>
- Herdiana, D., Sunan, U., & Djati Bandung, G. (2025). Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 470–478. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15063556>
- Kendi, I. K. (2024). *Implementasi Kebijakan Publik: Aktor, Perangkat, Manajemen, dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua*. Penerbit Manggu. www.penerbitmanggu.co.id



- Pora, S., Muksin, D., & Rahmat, A. F. (2025). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Pada Pemerintahan Prabowo-Gibran: Solusi dan Tantangan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 635–694. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i2.4352>
- Pujiyanto, A., & Solihat, M. (2026). Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Studi Kasus SMKN 1 Jogonalan. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 7(1), 115–128. <https://doi.org/10.63447/jimik.v7i1.1675>
- Rambe, M. T., Ritonga, R. A., Harahap, T., & Sitio, R. (2025). Pemetaan Awal Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Labuhanbatu: Perspektif Manajemen SDM. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 5177–5184. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4580>
- Silaban, S. L., Elsi, S., & Rizal, D. (2026). Analisis Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Jambi Menurut Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 3(1), 137–149. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v3i1.1547>
- Suryanto, E., Hazin, M., Purwoko, B., & Khamidi, A. (2026). Analisis Implementasi Program MBG terhadap Manajemen Pendidikan melalui Model Edward III: Suatu Kajian Pustaka. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 5(2), 231–240. <https://doi.org/10.30872/impian.v5i2.5998>
- Wibisono, M. I., & Santosa, S. (2026). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Meningkatkan Ketahanan Gizi Pelajar di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 11973–11981. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5365>
- Yuliani, F., Juniarsih, W., Prayitno, H., & Indri. (2026). Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia: Analisis Implementasi, Dampak terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Implikasinya bagi Sistem Pendidikan Nasional. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(2), 212–224.